



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2023  
Jakarta, 20 Februari 2024**

**Integritas Kuat,  
Peradilan Bermartabat**





**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2023**

Jakarta, 20 Februari 2024



**Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.**  
Ketua Mahkamah Agung RI

*Bismillahirrohmannirrohiim,  
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,  
Salam Kebajikan.*

- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo;
- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak K.H. Ma'ruf Amin;
- Yang Kami Hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
- Yang Kami Muliakan Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat:
  1. Ketua Dewan Peradilan Agung Negara Kuwait, Yang Mulia Dr. Adil Majid Burusli;
  2. Ketua Mahkamah Agung Negara Malaysia, Yang Mulia Tun Tengku Maimun binti Tun Mat;
  3. Ketua Mahkamah Agung Negara Singapura Yang Mulia Sundaresh Menon;
  4. Wakil Ketua Mahkamah Agung Negara Qatar Yang Mulia Abdullah Al-Sa'di;
  5. Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung/Wakil Menteri Kehakiman Kerajaan Saudi Arabia, Yang Mulia Dr. Najem Abdullah Muhammad Al-Zaid;
  6. Deputy Chief Judge Federal Circuit and Family Court of Australia, Yang Mulia Patrizia Mercuri;
  7. Wakil Ketua Pertama Mahkamah Agung Federasi Rusia Yang Mulia Sergei Rudakov serta seluruh delegasi yang hadir yaitu dari Mahkamah Agung Negara Australia, China, dan Sudan;
- Yang Kami Hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri;
- Yang Kami Muliakan Para Duta Besar Negara- Negara Sahabat, beserta Perwakilan Lembaga-  
Lembaga Internasional dan Mitra Pembaruan Mahkamah Agung;
  - Yang Kami Muliakan Para Purnabakti Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung serta Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama di seluruh Indonesia;
  - Yang Kami Hormati Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia;

- Yang Kami Hormati, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta jajarannya;
- Yang Kami Hormati, Para Pimpinan Redaksi, Jurnalis dan Wartawan dari Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online;
- Warga Peradilan di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara virtual, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga ke Pulau Rote, serta hadirin sekalian yang saya banggakan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan

Sidang Istimewa, dengan agenda tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, yang diikuti oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan serta diikuti secara daring oleh warga peradilan di seluruh Indonesia.

### **Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya hormati.**

Tahun ini, adalah tahun terakhir bagi saya menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung, karena masa jabatan saya akan berakhir pada bulan November 2024, sehingga selain saya akan menguraikan tentang capaian kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2023, saya juga akan merangkum secara garis besar capaian dan tantangan selama masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung dari sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini.

Munculnya pandemi di awal tahun 2020 bertepatan saat saya mulai memimpin Mahkamah Agung, telah mendorong percepatan terwujudnya

sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan. Jika kita merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, maka sistem peradilan elektronik sesungguhnya baru akan dikembangkan pada fase lima tahunan ke tiga, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 namun faktanya pada tahun 2022 sistem peradilan elektronik sudah dapat diimplementasikan bagi semua perkara dan semua tingkat pemeriksaan. Ini merupakan sebuah lompatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, namun dengan kesungguhan

dari segenap aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka semua itu dapat diwujudkan jauh sebelum waktu yang ditargetkan.

Bukan hanya itu, Mahkamah Agung juga telah menjadi pelopor bagi penerapan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi ( SPPT- TI) yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dikembangkan oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung.

Aplikasi e-BERPADU berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh institusi penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga proses penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.

Sedangkan untuk memulihkan kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja aparaturnya, Mahkamah Agung telah mencanangkan dan merealisasikan 14 langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Membersihkan para oknum Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik.
2. Memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparaturnya di Mahkamah Agung melalui sistem rotasi dan mutasi secara berkala.
3. Membangun sistem seleksi dan rekrutmen jabatan secara ketat dengan melibatkan rekam jejak integritas.
4. Memberhentikan para pejabat yang terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran.
5. Mengoptimalkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparaturnya Mahkamah Agung serta memasang CCTV di area kantor yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS- MA).
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu bersama-sama dengan Komisi Yudisial.
7. Menerjunkan *Mysterious Shopper* untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparaturnya di Mahkamah Agung.
8. Membentuk kanal pengaduan khusus (*Bawas Care*) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA.

9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam rangka pembentukan *mysterious shopper* dari unsur masyarakat.
10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara acak dengan menggunakan aplikasi SMART MAJELIS.
12. Memberlakukan sistem presentasi online menggunakan foto wajah (swa foto) dengan bantuan sistem GPS terkunci.
13. Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mandiri di Mahkamah Agung.
14. Mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diputar secara berkala di Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia.

### **Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya muliakan.**

Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagai berikut.

Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebanyak **27.512** perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak **27.252** perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak **260** perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara di tahun 2023 sebanyak **27.365** perkara atau sebesar **99,47%** sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 147 perkara. **JUMLAH SISA PERKARA TERSEBUT MERUPAKAN REKOR TERENDAH YANG PERNAH DICAPAI DALAM SEJARAH BERDIRINYA MAHKAMAH AGUNG.**

Selanjutnya, Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah berhasil menyelesaikan minutasasi perkara sebanyak **28.422** perkara. Dari jumlah minutasasi perkara tersebut sebanyak **27.060** perkara, atau sebesar **98,89%** diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Berdasarkan data di atas, maka hal itu menunjukkan bahwa kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun

2023 telah jauh melampaui target yang ditetapkan dan sebagian besar merupakan capaian kinerja tertinggi yang pernah dicapai Mahkamah Agung sepanjang masa.

Untuk gambaran kinerja Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak akan saya uraikan sebagai berikut:

Beban perkara pada tahun 2023 sebanyak **57.198** perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak **42.670** perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak **14.528** perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebanyak **43.832** perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar **76,67%** atau meningkat sebesar 3,87% dari tahun 2022.

Sedangkan, untuk gambaran kinerja penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Beban perkara tahun 2023 sebanyak **2.845.784** perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak **2.786.073** perkara, ditambah sisa perkara tahun 2022 sebanyak **59.711** perkara. Dari jumlah

tersebut, perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak

**2.724.345** perkara, dan perkara yang dicabut sebanyak **57.507** perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2023 adalah sebanyak **63.932** perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebesar **97.75%**.

Selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya juga akan menguraikan tentang kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*) sebagai berikut:

Pada tahun 2023, jumlah Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, dan Perkara Tata Usaha Negara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak **313.947** perkara, atau meningkat sebesar **10,86%** dibandingkan tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak **311.615** perkara atau sebesar 99,26% telah berhasil disidangkan secara *e-Litigation* atau meningkat sebesar 9,92% dari tahun 2022.

Sementara itu, pada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-Court* pada tahun 2023 adalah sebanyak **6.644** perkara. Dari jumlah perkara yang terdaftar ditambah dengan

siswa perkara tahun yang lalu, maka sebanyak **4.685** perkara telah selesai diputus secara e-Litigasi.

Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan *e-Court* sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak **594.816** pengguna, yang terdiri dari **239.984** Pengguna Terdaftar dari kalangan advokat dan **354.832** Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka jumlah perkara yang didaftar dan diselesaikan menggunakan sistem peradilan elektronik jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan peradilan elektronik. Hal ini sebagai dampak positif dari percepatan implementasi sistem peradilan elektronik ketika terjadinya pandemi Covid-19, sehingga perlahan tapi pasti, ke depannya semua penyelesaian perkara akan bermigrasi dari penyelesaian perkara secara konvensional ke penyelesaian perkara secara elektronik.

Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi bagi perkara perdata dan perkara

perdata agama, serta penyelesaian secara diversifikasi bagi perkara tindak pidana anak.

Selama tahun 2023, terdapat **26.739** perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar **34,16%**, sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversifikasi sebanyak **465** perkara, yang mana rasio keberhasilannya meningkat delapan kali lipat dari keseluruhan perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversifikasi pada tahun 2022.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*).

Pada tahun 2023, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri

sebanyak **6.453** perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sebanyak **206** perkara.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya pertentangan di antara dua putusan terhadap suatu perkara yang intinya sama, Mahkamah Agung saat ini mulai mengembangkan suatu teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan sebagai *decision support system* (DSS) yang dapat memberikan informasi sedini mungkin tentang kemungkinan kesamaan suatu perkara dengan perkara lainnya. Sistem ini sedang diujicobakan pada empat lingkungan peradilan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga diharapkan pada bulan September 2024, DSS tersebut sudah dapat direplikasi secara nasional.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap putusan pengadilan, yang salah satunya diukur dari perbandingan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan dengan jumlah perkara yang diputus oleh tingkat peradilan yang bersangkutan.

Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2023 yang diajukan upaya hukum banding, tercatat sebanyak **27.572** perkara atau sebesar 4,57% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut

menunjukkan bahwa, tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar **95,43%**. Pada tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak **16.719** perkara atau sebesar **55,04%** dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar **44,96%**.

Sedangkan Pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak **2.040** perkara, atau sebesar **12,22%** dari keseluruhan putusan kasasi, sehingga tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar **87,78%**.

Untuk jumlah pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara narkoba, perkara kehutanan, perkara perlindungan anak, perkara perikanan, perkara pencucian uang, dan perkara-perkara tindak pidana lainnya saya akan uraikan sebagai berikut.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar **Rp61.407.546.134.553** (**enam puluh satu triliun, empat ratus tujuh miliar, lima ratus empat puluh enam juta, seratus tiga puluh empat ribu, lima**

**ratus lima puluh tiga rupiah).** Sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum adalah sebesar **Rp52.751.605.982.144 (lima puluh dua triliun, tujuh ratus lima puluh satu miliar, enam ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu, seratus empat puluh empat rupiah)** dan peradilan militer sebesar **Rp260.190.241.912 (dua ratus enam puluh**

**miliar, seratus sembilan puluh juta, dua ratus empat puluh satu ribu, sembilan ratus dua belas rupiah).**

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah memberikan kontribusi bagi penerimaan keuangan negara yang berasal dari penarikan PNPB tahun 2023 senilai **Rp77.721.874.433 (tujuh puluh tujuh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus tujuh puluh empat ribu, empat ratus tiga puluh tiga rupiah).**

### **Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya banggakan.**

Setelah saya menyampaikan gambaran umum tentang capaian kinerja di bidang teknis perkara, sekarang saya akan menguraikan tentang prestasi yang diraih Mahkamah Agung selama tahun 2023 sebagai berikut:

Selama tahun 2023, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan yang membanggakan, antara lain sebagai berikut:

1. Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung.
2. Meraih anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III, Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara;
3. Meraih Penghargaan Garuda Pelindung Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
4. Mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Predikat Informatif;
5. Meraih Juara terbaik ke-3 LAN Award 2023, sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi bagi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, dengan Kategori Adaptive Learning Strategy;
6. Mendapatkan Penghargaan dari Menteri Keuangan Kepada Para Pimpinan Kementerian/Lembaga

- yang memiliki Kinerja Anggaran Terbaik Berdasarkan Kategori Besaran Nilai Pagu Anggaran;
7. Meraih Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Mitra Strategis atas pelaksanaan aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dalam penyusunan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di badan peradilan Tahun 2023.
  8. Mendapatkan penghargaan sebagai Penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Gambir 1.
  9. Meraih Penghargaan KORPRI AWARD untuk kategori Life time achievement dari Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
  10. Mendapatkan predikat bintang 5 Top Digital Award untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Selanjutnya terkait dengan capaian kinerja di bidang kesekretariatan saya akan uraikan sebagai berikut.

Pertama, Bidang Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara.

Total pagu awal anggaran Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebesar **Rp12.246.218.410.000 (dua belas triliun, dua ratus empat puluh enam miliar, dua ratus delapan belas juta, empat ratus sepuluh ribu rupiah)**. setelah mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar

**Rp350.331.975.000 (tiga ratus lima puluh miliar, tiga ratus tiga puluh satu juta, sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** kemudian mendapatkan hibah sebesar **Rp15.631.914.000 (lima belas miliar, enam ratus tiga puluh satu juta, sembilan ratus empat belas ribu rupiah)** dan penggunaan dana PNPB sebesar **Rp16.032.834.000 (enam belas miliar, tiga puluh dua juta, delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** maka total pagu Mahkamah Agung tahun 2023 menjadi **Rp11.911.520.197.000 (sebelas triliun, sembilan ratus sebelas miliar, lima ratus dua puluh juta, seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp11.594.034.601.949 (sebelas triliun, lima ratus sembilan puluh empat miliar, tiga puluh empat juta, enam ratus satu ribu, sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)** atau **97,33%**.

Kedua, Bidang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat, untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Dalam hal pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya perubahan dan perbaikan budaya kerja dan pelayanan publik.

Pada tahun 2023 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 33 satuan kerja dan satu satuan kerja memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Agama Magelang. Selain itu, 3 satuan kerja pengadilan mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik dalam sarana dan prasarana ramah terhadap kelompok rentan yaitu Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, serta satuan Pengadilan Agama Cilegon memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima.

### **Ketiga, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia.**

Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan pada tahun 2023 telah telah berhasil mendidik dan melatih sebanyak **7.315** aparatur, yang terbagi ke dalam dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan teknis sebanyak **3.284** aparatur, atau sebesar **96,59%** dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak **3.400** aparatur serta pelatihan manajemen dan kepemimpinan sebanyak **4110** aparatur, atau sebesar **110,18%** dari target yang direncanakan, yaitu **3.730** aparatur.

Selain itu, pada tahun 2023, Mahkamah Agung berhasil meningkatkan Unit Penilaian Kompetensi (Assesmen Center) Mahkamah Agung menjadi terakreditasi A, sehingga Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung saat ini telah memiliki kualifikasi teknis secara organisasi, sumber daya manusia dan metode penilaian kompetensi untuk melakukan penilaian kompetensi bagi PNS pada jenjang jabatan pelaksana hingga jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, baik untuk jabatan di internal Mahkamah Agung maupun pada Kementerian/Lembaga yang lain di luar Mahkamah Agung.

Aspek integritas menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga Mahkamah Agung akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan di tubuh lembaga dengan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan, agar ke depannya tingkat pelanggaran disiplin bisa terus berkurang dan kepercayaan publik akan tumbuh seiring dengan kokohnya integritas dari segenap aparturnya.

Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut: Untuk data jumlah pengaduan dan

penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2023 tercatat jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 4.138. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.949 pengaduan atau 95,43% telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 189 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sedangkan jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2023 adalah sebanyak 295 sanksi disiplin, yang terdiri dari 83 sanksi berat, 63 sanksi sedang, dan 149 sanksi ringan.

### **Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya hormati.**

Demikianlah secara garis besar hasil capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2023. Kami menyadari, pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, namun Mahkamah Agung selalu optimis dan berupaya untuk menjadi lebih baik dengan melakukan berbagai perubahan di segala bidang.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pada Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat, Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah

Agung, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pendidikan lainnya, Mitra Perbankan,

Taspen, Lembaga-Lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta dan semua pihak lainnya, yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita mampu meraih capaian- capaian yang sangat membanggakan ini.

Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan kepada seluruh keluarga besar Mahkamah Agung dan Warga Peradilan yang mengikuti secara luring dan daring dari seluruh pelosok Indonesia.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa betapa pun beratnya tantangan yang kita hadapi, semua itu akan terasa ringan jika kita memiliki tekad yang sama, fokus berjalan ke depan untuk meniti masa depan yang lebih baik, sehingga semua tantangan itu berhasil kita hadapi dan prestasi pun mampu kita raih.

Semoga Allah SWT/Tuhan YME senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. *Aamiin Ya Robbal'alamin, Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Jakarta, 20 Februari 2024

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**





**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110  
(021) 3843348, 3810350, 3457661  
[persuratan@mahkamahagung.go.id](mailto:persuratan@mahkamahagung.go.id)